

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan mengenai identifikasi kepentingan dalam pelaksanaan mutasi ASN di lingkungan pemerintahan daerah Kabupaten Bungo yang kemudian dilakukan pengumpulan data secara detail melalui metode wawancara dan juga mendapatkan dukungan data untuk dokumentasi yang kemudian dilakukan analisis data berdasarkan konsep teori politisasi birokrasi oleh pemikiran Barbara Geddes yang menjadi pedoman peneliti selama penelitian berlangsung, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa asumsi peneliti yang menitikberatkan persoalan mutasi ASN ini dengan adanya indikasi kepentingan bupati selaku pejabat pembina kepegawaian (PPK) terhadap birokrasi dapat terjawab.

Kepentingan bupati selaku PPK dalam struktur pemerintahan di Kabupaten Bungo menjadi bentuk politisasi birokrasi yang terjadi dikarenakan pada persoalan mutasi ASN tersebut adalah keputusan yang sejalan dengan konsep atau teori yang berasal dari pemikiran Barbara Geddes, bahwa kepentingan bupati sebagai pejabat politik yang memanfaatkan birokrasi untuk memenuhi tiga kepentingan utama yaitu, (1) Melanggengkan/mempertahankan kekuasaan; (2) Menciptakan mesin politik yang loyal; dan (3) Mewujudkan efektifitas pemerintahan. Secara umum, ketiga kepentingan utama tersebut

memang dilakukan oleh bupati secara tidak langsung pada pelaksanaan mutasi ASN di Kabupaten Bungo.

Berdasarkan tiga kepentingan utama bupati dalam melakukan mutasi ASN, hanya satu indikator yang terlihat mendominasi kepentingan bupati secara pribadi. Menciptakan mesin politik yang loyal menjadi kebutuhan awal bupati agar kemudian mampu memenuhi kepentingannya dalam mewujudkan visi-misi dalam hal pembangunan Kabupaten Bungo dan juga terdapat kepentingan lainnya seperti mempertahankan kekuasaannya yang dilakukan secara tidak langsung. Hal ini bupati sebagai pejabat politik yang memegang kekuasaan tertinggi di pemerintahan daerah saat ini tentu membutuhkan dukungan sumber daya, tidak hanya uang namun sumber daya manusia terkhususnya di kalangan birokrasi. Kemudian pada indikator mempertahankan atau melanggengkan kekuasaan dan mewujudkan efektifitas pemerintahan, peneliti mengambil kesimpulan bahwa kepentingan-kepentingan tersebut belum dapat terjawab secara maksimal, detail dan komprehensif berdasarkan temuan data di lapangan maupun dukungan data sekunder sehingga untuk lebih lengkapnya akan peneliti sarankan bagi penelitian selanjutnya.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah peneliti tuliskan sebelumnya, maka peneliti memiliki beberapa saran yaitu:

1. Kajian politisasi birokrasi yang peneliti hadirkan berdasarkan konsep dan

teori yang bersumber dari pemikiran Barbara Geddes, diharapkan mampu memberikan masukan berharga bagi perkembangan birokrasi yang berkelanjutan, terkhusus pada pemerintah daerah, dengan mengetahui bentuk politisasi birokrasi yang dilakukan kepala daerah maka hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat, ASN, dan pemangku kebijakan untuk dapat mengantisipasi kejadian yang sama tidak terjadi lagi.

2. Selain kajian politisasi birokrasi yang digunakan untuk mengidentifikasi persoalan kepentingan mutasi ASN yang terjadi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bungo tahun 2021, tentu diharapkan dapat dilakukan penelitian lanjutan untuk mengidentifikasi masalah tersebut dari perspektif politik kebijakan. Peneliti selanjutnya juga diharapkan dapat berangkat dari perspektif *good governance* untuk melihat efektifitas pemerintahan sebagai satu indikator dari pemikiran Barbara Geddes yang belum dapat peneliti jawab pada penelitian ini secara detail.

